

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL



Rudy C. Tarumingkeng

*Rudy C Tarumíngkeng: Strategi Indonesia dalam Menghadapi
Persaingan Ekonomi Global*

Professor of Management NUP: 9903252922
Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)
Rektor, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)
Chairman Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)
Data Analyst and Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

URL: <https://rudyct.com/ab/Buku-Artikel-rudyct-23-24.htm>

© RUDYCT e-PRESS
rudyct75@gmail.com
Bogor, Indonesia
17 October 2025

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL

Berikut ini paparan yang berupaya menyajikan **strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global**, dalam pendekatan akademik (konseptual + empiris) yang dilengkapi contoh dan studi kasus. Karena ruangnya luas, saya akan membaginya ke dalam beberapa bagian utama agar struktur lebih jelas:

- 1. Konteks dan Tantangan Global**
- 2. Visi dan Kerangka Strategis Nasional**
- 3. Strategi Makroekonomi dan Kebijakan Publik**
- 4. Strategi Industri, Inovasi, dan Hilirisasi**
- 5. Peran Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Teknologi**
- 6. Diplomasi Ekonomi, Kebijakan Perdagangan, dan Integrasi Global**
- 7. Ketahanan Ekonomi, Infrastruktur, dan Penguatan Lokal**
- 8. Implementasi, Koordinasi, dan Tantangan**
- 9. Kritik, Risiko, dan Perspektif Ke Depan**
- 10. Penutup & Rekomendasi**

1. Konteks dan Tantangan Global

1.1 Transformasi Ekonomi Dunia

Sejak era liberalisasi perdagangan dan percepatan globalisasi sejak akhir abad ke-20, negara-negara berkembang berada dalam persaingan terbuka untuk mendapatkan modal, teknologi, akses pasar, dan rantai

nilai global. Krisis keuangan global, pandemi COVID-19, disrupti teknologi (digitalisasi, otomasi, kecerdasan buatan), dan tekanan geopolitik (perang dagang, proteksionisme, fragmentasi rantai pasok) semakin memperumit lanskap kompetisi global.

Beberapa ciri utama tantangan global:

- **Fragmentasi rantai nilai global;** perusahaan multinasional mendesentralisasi produksi dan mencari efisiensi geografis.
- **Fluktuasi harga komoditas dan mata uang;** negara penghasil komoditas sangat rentan terhadap guncangan eksternal.
- **Teknologi sebagai kunci keunggulan bersaing;** negara dengan kapasitas R&D, inovasi, digitalisasi lebih unggul.
- **Tekanan proteksionisme dan standarisasi regulasi internasional;** hambatan non-tarif, persyaratan lingkungan, regulasi teknologi tinggi.
- **Persaingan sumber daya manusia dan migrasi bakat;** negara maju dan kawasan “tech hubs” menarik talenta dari negara berkembang.
- **Ketidakpastian politik dan geopolitik;** konflik antarnegara, perubahan kebijakan proteksi, sanksi ekonomi, dan pergeseran aliansi global.

Dalam konteks Indonesia, beberapa tantangan spesifik muncul:

- Ketergantungan pada ekspor komoditas primer (minyak, batu bara, kelapa sawit, nikel).
- Rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global manufaktur.
- Kapasitas teknologi lokal, R&D, dan inovasi yang belum memadai.
- Tantangan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing SDM.
- Infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah kepulauan.

- Hambatan regulasi dan birokrasi, serta kelemahan koordinasi antarlembaga.
- Ketidakpastian kebijakan di dalam negeri (perubahan rezim, kebijakan fiskal, proteksionisme, subsidi, dll.).

Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, daya saingnya menurun dibanding negara pesaing regional. (csis.or.id)

Oleh karena itu, strategi menghadapi persaingan global harus menyentuh berbagai aspek—struktur ekonomi, kebijakan, kapasitas inovasi, sumber daya manusia, diplomasi ekonomi, dan infrastruktur.

2. Visi dan Kerangka Strategis Nasional

Sebelum merinci strategi, penting dipahami bahwa Indonesia telah menetapkan visi dan kerangka strategis jangka panjang sebagai arah transformasi ekonomi. Dua elemen penting:

- **Visi Indonesia 2045 (“Golden Indonesia 2045”)**
Visi ini menargetkan agar Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan, dengan pilar utama: pembangunan manusia & penguasaan sains-teknologi; pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; pemerataan pembangunan; dan penguatan daya tahan nasional / tata kelola. ([Wikipedia](https://id.wikipedia.org/wiki/Visi_Indonesia_2045))
- **RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah**
Melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), pemerintah mengartikulasikan prioritas pembangunan lima tahunan yang berfokus pada percepatan ekonomi, digitalisasi, pengembangan kawasan, reformasi regulasi, dan transformasi industri.

Visi dan kerangka ini menjadi basis agar strategi menghadapi persaingan global tidak bersifat reaktif tetapi terencana dan sinergis.

Dalam kerangka strategi global-nasional, beberapa prinsip penting perlu dipegang:

1. **Keunggulan kompetitif (competitive advantage):** bukan sekadar mengikuti, melainkan menemukan ceruk keunggulan — baik sumber daya alam, kualitas produk, komoditas hilir, maupun produk-produk berbasis teknologi tinggi.
2. **Integrasi lokal-global:** memadukan potensi domestik (zona ekonomi daerah, UMKM, sumber daya lokal) dengan akses global.
3. **Fleksibilitas dan adaptabilitas:** menghadapi dinamika eksternal global (geopolitik, teknologi, pasar global) dengan kebijakan yang fleksibel.
4. **Inclusiveness (keadilan dan pemerataan):** agar manfaat pertumbuhan dan daya saing tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, atau di kalangan elit.
5. **Sustainabilitas dan tanggung jawab lingkungan:** agar pertumbuhan tidak merusak lingkungan dan merusak kredibilitas internasional (sesuai tren ESG).

Dengan dasar visi dan prinsip strategis ini, berikut kita paparkan komponen strategi lebih operasional.

3. Strategi Makroekonomi dan Kebijakan Publik

Strategi makro bersifat “kerangka payung” yang menjaga stabilitas, kepercayaan investor, dan daya tahan terhadap guncangan eksternal.

3.1 Stabilitas Makro dan Keuangan

Pilar utama:

- **Disiplin fiskal dan pengelolaan utang**
Pemerintah harus menjaga defisit anggaran agar tidak berlebihan, memperkuat basis penerimaan negara (khususnya pajak), serta mengelola utang secara bijak agar suku bunga tidak menekan investasi domestik.

- **Pengaturan moneter dan nilai tukar**
Stabilitas inflasi dan kurs merupakan syarat agar sektor ekspor tetap kompetitif, investor merasa aman, dan konsumsi domestik tidak terguncang.
- **Cadangan devisa dan perlindungan eksternal**
Memiliki cadangan devisa yang memadai atau mekanisme lindung nilai untuk menghadapi arus modal keluar/masuk dan guncangan eksternal.
- **Kebijakan countercyclical (anti-siklus)**
Di saat krisis global, Indonesia perlu menjaga stimulus fiskal yang tepat sasaran (misalnya dukungan UMKM, infrastruktur) dan menjaga konsumsi domestik agar tidak jatuh drastis. Kemenkeu menyebut perlunya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas makro untuk menahan dampak perlambatan global. ([Media Keuangan](#))

3.2 Reformasi Pajak dan Kebijakan Pendapatan Negara

- **Perluasan dasar pajak & reformasi administrasi perpajakan**
Perlu transformasi digital sistem perpajakan, mengurangi celah (tax gap), mendorong kepatuhan pajak, dan memperluas basis pajak (misalnya sektor formalisasi UMKM).
- **Global minimum tax**
Indonesia ikut menerapkan regulasi pajak minimum global (15%) bagi perusahaan multinasional sejak 1 Januari 2025 guna menghindari praktik elusi pajak dan menjaga citra fiskal nasional. ([Reuters](#))
- **Insentif terarah**
Pemerintah perlu memberikan insentif (tax holiday, pengurangan pajak, subsidi penelitian & pengembangan) kepada sektor strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong inovasi.

3.3 Regulasi Pro-Kompetisi dan Reformasi Birokrasi

- **Revisi regulasi anti monopolistik dan kebijakan persaingan usaha**

Regulasi lama (Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persaingan Usaha) dinilai belum memadai untuk ekonomi digital. Diperlukan roadmap kebijakan yang memperkuat prinsip persaingan usaha. (csis.or.id)

- **Regulatory review & deregulasi**

Meninjau regulasi lama yang menghambat investasi atau inovasi, menghapus peraturan tidak perlu, dan menyederhanakan perizinan (one-stop services).

- **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan**

Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga pemerintahan agar biaya transaksi (regulatory burden) bagi pelaku usaha menurun.

- **Koordinasi pusat-daerah**

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi investasi lokal, pengembangan kawasan, dan regulasi lokal. Koordinasi yang lemah bisa menjadi penghambat.

3.4 Kebijakan Fiskal Daerah, Desentralisasi, dan Otonomi Fiskal

- Memberi insentif fiskal (misalnya tax sharing) kepada daerah yang berhasil menarik investasi atau menciptakan ekosistem industri baru.
- Mendorong otonomi fiskal yang proporsional agar daerah punya fleksibilitas dalam pengembangan potensi lokal (misalnya sektor pariwisata, kelautan, pertanian, industri skala kecil).

3.5 Kebijakan Stabilitas Sosial dan Redistribusi

- Program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran agar pertumbuhan yang dihasilkan “mengena” kepada masyarakat luas dan mengurangi kesenjangan.

- Investasi dalam perlindungan sosial (kesehatan, pendidikan, jaring pengaman) agar muncul dukungan sosial terhadap transformasi ekonomi (termasuk sektor disruptif).
- Kebijakan pengampunan dan restrukturisasi kredit UMKM di masa-masa sulit sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi.

Secara ringkas, strategi makro ini menjaga agar ekonomi nasional tetap kokoh, mencegah bonam (crash) akibat guncangan global, serta menciptakan kredibilitas di mata investor internasional.

4. Strategi Industri, Inovasi, dan Hilirisasi

Strategi ini adalah jantung adaptasi terhadap kompetisi global: bagaimana Indonesia bergerak dari ekspor bahan mentah ke produk berteknologi tinggi dan berdaya saing tinggi.

4.1 Hilirisasi dan Industrialisasi

Presiden Jokowi beberapa kali menekankan bahwa bahan mentah harus diproses di dalam negeri agar nilai tambah tidak bocor ke luar negeri. ([Kemenko PMK](#))

Contoh konkret: pengolahan nikel menjadi bahan baterai lithium, pengolahan mineral langka, dan pembuatan produk elektronik lokal.

Hilirisasi bukan sekadar proses produksi, tetapi mencakup pengembangan ekosistem (pasokan bahan baku, tenaga kerja terampil, fasilitas R&D, akses pasar).

Namun tantangannya besar:

- Harga minyak dan mineral global berfluktuasi, membuat bisnis hilir terkadang tidak menguntungkan.
- Kapasitas teknologi dalam negeri masih terbatas.
- Permintaan global terhadap barang hilir Indonesia belum stabil di semua jenis produk.

Kritik dalam beberapa literatur menyebut bahwa strategi hilirisasi yang terlalu statis (obsesi nilai tambah saja) tanpa memerhatikan keunggulan komparatif dapat menimbulkan distorsi dan inefisiensi. (csis.or.id)

4.2 Pengembangan Sektor Strategis: Teknologi, Green Economy, dan Industri Khusus

- **Teknologi tinggi dan manufaktur modern**
Memprioritaskan sektor-sektor seperti semikonduktor, komponen elektronik, bioteknologi, energi terbarukan.
- **Energi hijau (green economy) dan teknologi bersih**
Mengingat tekanan ESG dan perubahan iklim, Indonesia perlu bergerak ke ekonomi rendah karbon (renewables, baterai, kendaraan listrik). Komitmen Indonesia terhadap transisi energi tercermin dalam Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP). ([Wikipedia](https://www.wikipedia.org))
- **Industri kreatif dan ekonomi digital**
Industri konten (musik, film, game), aplikasi digital, fintech, e-commerce menjadi sektor dengan biaya masuk relatif rendah dan potensi ekspor tinggi.
- **Sektor pariwisata, ekonomi maritim, dan kelautan**
Indonesia sebagai negara maritim bisa memanfaatkan potensi kelautan (ikan, bioteknologi laut, pariwisata pantai) untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

4.3 Inovasi, R&D, dan Ekosistem Start-up

- **Peningkatan investasi R&D**
Anggaran negara & swasta harus diarahkan ke penelitian terapan dan kolaborasi universitas-industrial.
- **Insentif perusahaan inovatif**
Keringanan pajak, fasilitas inkubasi, dukungan riset dan hak kekayaan intelektual.

- **Ekosistem kewirausahaan & start-up nasional**
Mendorong lahirnya “unicorn” Indonesia di bidang teknologi dan produk ekspor digital (Fintech, HealthTech, EdTech).
- **Kolaborasi internasional dalam riset dan inovasi**
Kerja sama riset lintas negara untuk transfer teknologi dan akses ke jaringan global inovasi.

4.4 Diversifikasi Produk dan Pasar

- Tidak tergantung pada satu jenis produk atau pasar. Strategi diversifikasi produk (komoditas atau barang manufaktur) serta diversifikasi negara tujuan ekspor.
- Strategi “multi-sumber pasar” agar ketika satu pasar melemah, produk ekspor masih memiliki tempat di pasar lain.
- Lipsing adopsi tren global (misalnya produk ramah lingkungan, circular economy).

4.5 Peningkatan Kapasitas Industri Lokal dan UMKM

- Mendukung UMKM untuk naik kelas (scale up), bergabung ke rantai nilai global.
- Fasilitasi akses teknologi, pembiayaan, pelatihan manajemen, pemasaran ekspor.
- Kendala utama: skala produksi, kualitas standar ekspor, pengemasan, logistik, regulasi.

5. Peran Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Teknologi

Strategi tanpa SDM unggul dan teknologi modern akan sulit berhasil. Fokus pada aspek manusia dan teknologi adalah kunci kompetisi jangka panjang.

5.1 Pendidikan, Keterampilan, dan Transformasi Tenaga Kerja

- **Reformasi kurikulum:** memasukkan literasi digital, pemrograman dasar, kecerdasan buatan, sains dan matematika.

- **Pelatihan vokasi dan sertifikasi internasional:** agar tenaga kerja dapat langsung mendukung produksi industri modern dan rantai nilai global.
- **Program pelatihan seumur hidup (lifelong learning):** sebagai respons terhadap perubahan teknologi yang cepat.
- **Mobilitas tenaga kerja:** memfasilitasi mobilitas tenaga kerja antardaerah agar daerah yang tertinggal dapat mendapatkan keunggulan human capital.
- **Mengurangi kesenjangan antar wilayah:** SDM unggul tidak hanya berada di Jawa; perlu pengembangan kualitas pendidikan di luar Jawa.

5.2 Digitalisasi, Infrastruktur TIK, dan Kecerdasan Buatan

- **Pembangunan infrastruktur TIK:** jaringan broadband, 5G, satelit, konektivitas antar pulau.
- **Transformasi digital sektor publik dan swasta:** sistem pelayanan pemerintah digital (e-government), digitalisasi rantai pasok, otomatisasi industri.
- **Pemanfaatan AI, big data, dan IoT:** untuk meningkatkan efisiensi operasional, prediksi permintaan, manajemen rantai suplai.
- **Keamanan siber (cybersecurity):** sangat penting agar data nasional tidak terancam dan ekosistem digital dapat dipercaya.
- **Inklusi digital:** memastikan masyarakat di wilayah terpencil memiliki akses teknologi sehingga tidak tertinggal.

5.3 Penelitian & Kolaborasi Akademik-Industry

- Universitas dan lembaga riset harus lebih dipacu kolaborasi dengan industri, startup, BUMN, dan lembaga internasional.
- Program riset bersama (joint research), kolaborasi paten, dan inkubasi teknologi lokal.

- Memperkuat lembaga litbang (LIPI, BPPT, BRIN, dll) agar memiliki relevansi industri.

Secara keseluruhan, aspek SDM dan teknologi merupakan enabler utama agar strategi industri dan ekspor bisa dijalankan.

6. Diplomasi Ekonomi, Kebijakan Perdagangan & Integrasi Global

Strategi global tidak hanya internal; diplomasi dan kebijakan eksternal sangat menentukan kemampuan Indonesia bermain di panggung dunia.

6.1 Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi

- Indonesia sudah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan, seperti IK-CEPA (kerjasama ekonomi Indonesia – Korea) yang menghapus tarif banyak barang. ([Wikipedia](#))
- Negosiasi FTA dengan Uni Eropa ditargetkan selesai pada 2026. ([Reuters](#))
- Perlu terus memperluas jaringan FTA, CEP (Comprehensive Economic Partnership), dan perjanjian wilayah (ASEAN, RCEP, AEC) untuk memperluas akses pasar.
- Harus menjaga keseimbangan antara membuka pasar (akses ekspor) dan melindungi industri domestik yang baru tumbuh (strategi “opening with safeguards”).

6.2 Diplomasi Ekonomi & Soft Power

- Diplomasi ekonomi: promosi investasi, pengembangan kluster industri tertentu, dan pencitraan brand “Made in Indonesia” global.
- Soft power budaya, brand, dan pariwisata sebagai bagian dari strategi “branding nasional” agar produk Indonesia dikenal baik.
- Diplomasi Teknologi: menjalin kerja sama teknologi tinggi, transfer teknologi, joint ventures dengan negara maju.

- Keanggotaan di forum global (G20, BRICS, ASEAN, APEC) sebagai arena diplomasi ekonomi dan positioning strategis.

6.3 Proteksi Strategis dan Kebijakan Non-Tarif

- Sementara membuka akses pasar, Indonesia tetap dapat menerapkan kebijakan proteksi terhadap sektor strategis (misalnya tarif impor barang yang mampu dibuat lokal, aturan kandungan lokal, persyaratan standar lingkungan). ([Appihi Journal](#))
- Pengaturan hambatan non-tarif (sertifikasi, regulasi teknis) agar produk lokal bisa bersaing.

6.4 Mitigasi Risiko Global

- Dalam diplomasi, Indonesia harus aktif memantau risiko global: perang dagang, sanksi ekonomi, perubahan regulasi ESG, dan ekspektasi global terhadap isu lingkungan dan sosial.
- Membangun mekanisme proteksi (hedging ekonomi, perjanjian investasi bilateral, pengaturan kerjasama multilateral).

6.5 Promosi Ekspor dan Branding Global

- Pemerintah institusional menyelenggarakan pameran dagang internasional, misi dagang, dan promosi komersial.
- Sertifikasi mutu internasional (ISO, halal, fair trade) agar produk Indonesia dapat diterima di pasar maju.
- Pendampingan ekspor untuk perusahaan kecil agar mampu memenuhi persyaratan pasar.

7. Ketahanan Ekonomi, Infrastruktur, dan Penguatan Lokal

Strategi global tidak akan berhasil jika infrastruktur domestik lemah dan ketimpangan antar wilayah besar. Oleh karena itu, penguatan lokal dan pembangunan infrastruktur menjadi strategi penting.

7.1 Infrastruktur Fisik

- Jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan rel kereta api (termasuk di luar Jawa) untuk mendukung distribusi produksi dan ekspor.
- Pelabuhan laut sebagai hub ekspor, khususnya di wilayah timur Indonesia, untuk mendekatkan akses ke pasar global.
- Pembangunan kawasan ekonomi khusus (SEZ), industri kawasan terpadu, dan fasilitas logistik (cold chain, pusat distribusi) agar biaya logistik bisa ditekan.
- Energi & listrik yang andal agar industri tidak terganggu mati-mati listrik.

7.2 Infrastruktur Sosial dan Konektivitas Lokal

- Konektivitas antar desa dan kota (transportasi, TIK) agar produsen di daerah terpencil terhubung pasar nasional maupun global.
- Infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan di daerah agar SDM di seluruh wilayah bisa berkembang.
- Infrastruktur keuangan digital (branchless banking, fintech) untuk membuka akses keuangan di wilayah terpencil.

7.3 Pengembangan Wilayah Terpencil dan Daerah Tertinggal

- Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, pariwisata komunitas) di daerah tertinggal agar tidak hanya berfokus di pusat-pusat ekonomi.
- Insentif investasi daerah (tax incentive, kemudahan izin) agar investor juga tertarik ke luar Jawa.
- Program “pengembangan klaster lokal global” agar daerah bisa mengeksport produk khas dengan kualitas ekspor.

7.4 Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam

- Mengurangi ketergantungan impor pangan (beras, jagung, kedelai) dengan mendukung produksi lokal dan inovasi agritech.

- Keamanan energi: diversifikasi sumber energi (terbarukan) agar dalam situasi global yang kacau, pasokan energi tidak terganggu.
 - Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan menjaga reputasi ekspor (aspek ESG).
-

8. Implementasi, Koordinasi, dan Tantangan

Strategi jika tidak diimplementasikan konsisten dan dikoordinasikan dengan baik akan gagal. Berikut adalah aspek kritis dalam implementasi:

8.1 Mekanisme Koordinasi Lintas Kementerian & Daerah

- Dibutuhkan semacam “komando sentral” strategis (misalnya kabinet ekonomi) untuk menyelaraskan kebijakan antar K/L.
- Mekanisme evaluasi terstruktur dan audit kebijakan untuk memastikan implementasi sesuai target.

8.2 Prioritas & Fokus Strategis

- Tidak mungkin semua sektor ditangani sekaligus. Pemerintah perlu menetapkan prioritas (misalnya sektor baterai, semi-konduktor, industri hijau, digital).
- Fokus geografis juga diperlukan: kawasan industri vs daerah terpencil vs wilayah perbatasan.

8.3 Pendanaan dan Insentif

- Sumber pendanaan: APBN, investasi swasta, FDI, dana internasional (bank dunia, lembaga pembangunan).
- Insentif yang kompetitif tetapi hati-hati agar tidak memicu distorsi pasar atau beban fiskal jangka panjang.

8.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Penyesuaian Strategi

- Sistem monitoring indikator kinerja strategis (KPI) — ekspor, investasi, produktivitas, R&D, inovasi, kualitas SDM.

- Evaluasi berkala dan fleksibilitas revisi strategi berdasarkan dinamika global.

8.5 Tantangan Utama & Hambatan

- Resistensi birokrasi dan kepentingan kelompok.
- Keterbatasan kapasitas administratif di instansi pemerintah daerah.
- Durasi politik yang relatif pendek (masa jabatan) dan perubahan kebijakan di tiap periode.
- Tekanan dana fiskal, terutama jika terjadi krisis eksternal.
- Ketidaksiapan perusahaan lokal (skala kecil, mod teknologi rendah) untuk bersaing global.
- Kesenjangan antar wilayah: Jawa vs luar Jawa sering memiliki kapasitas berbeda jauh.
- Risiko eksternal: konflik global, krisis finansial, perubahan proteksionisme.

9. Kritik, Risiko, dan Perspektif Ke Depan

Dalam upaya strategis ini, perlu diantisipasi kritik dan risiko agar strategi tidak menjadi semacam “wishful thinking”.

9.1 Kritik Strategi “Hilirisasi” vs Keunggulan Komparatif

Banyak kritik menyebut bahwa hilirisasi tidak boleh dipaksakan jika belum ada keunggulan komparatif. Jika dilakukan secara tidak hati-hati, bisa menimbulkan industri “terpaksa” yang tidak kompetitif, beban subsidi, atau “distorsi pasar.” (csis.or.id)

Strategi ideal mengombinasikan hilirisasi secara selektif (komoditas unggul) dengan penetrasi manufaktur global yang benar-benar kompetitif.

9.2 Risiko Overeksposur ke Global

Jika orientasi berlebihan ke pasar global, maka ketika terjadi krisis global (resesi dunia, perang dagang) ekspor Indonesia akan terpukul keras. Oleh karena itu, strategi domestik (basis konsumsi, pasar lokal) harus kokoh sebagai penyangga.

9.3 Risiko Ketergantungan Modal Asing

Jika investasi asing mendominasi sektor strategis, bisa muncul risiko “kapital ekstraktif” atau ketergantungan teknologinya asing. Pemerintah perlu mengatur agar transfer teknologi dan keterlibatan lokal (local content) mendapat porsi memadai.

9.4 Tantangan Keberlanjutan Lingkungan dan Reputasi Global

Negara maju dan pasar ekspor semakin menuntut standar ESG (environment, social, governance). Produk atau industri yang mencemari lingkungan dapat diboikot atau dikenakan tarif penalti. Oleh karena itu, strategi harus memperhitungkan aspek keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan.

9.5 Persaingan Negara Pesaing yang Juga Membenahi Strateginya

Negara-negara pesaing (Vietnam, Thailand, Malaysia, India) juga meningkatkan kapabilitas industrinya, insentif untuk investor, dan reformasi. Indonesia harus terus memperbaiki daya saing agar tidak tertinggal.

9.6 Ketidakpastian Geopolitik

Ketegangan antarnegara, perang dagang, dan perubahan aliansi baru bisa mempengaruhi akses pasar dan keamanan investasi. Strategi Indonesia harus punya “plan B” untuk beradaptasi cepat.

9.7 Masalah Kepemimpinan & Konsistensi Kebijakan

Transisi pemerintahan, perubahan prioritas politik bisa memicu pembatalan atau perubahan strategi yang sudah berjalan. Untuk itu, konsistensi dan komitmen lintas generasi sangat penting.

10. Penutup & Rekomendasi

10.1 Ringkasan Strategis

Secara ringkas, strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global harus mencakup:

- Stabilitas makro, fiskal, dan kebijakan pro-investasi.
- Reformasi regulasi pro-kompetisi dan penyederhanaan birokrasi.
- Pengembangan industri bernilai tambah, teknologi, dan green economy.
- Penumbuhan inovasi, R&D, dan ekosistem teknologi lokal (start-ups).
- Penguatan SDM melalui pendidikan, pelatihan, digitalisasi.
- Diplomasi ekonomi aktif, perjanjian perdagangan strategis, dan proteksi selektif.
- Infrastruktur fisik dan sosial agar konektivitas dan distribusi efisien.
- Ketahanan lokal, diversifikasi produk & pasar, dan pembangunan daerah tertinggal.
- Koordinasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan mekanisme adaptasi cepat.

10.2 Rekomendasi Kebijakan & Langkah Prioritas

Beberapa rekomendasi yang bersifat “actionable”:

1. **Identifikasi & fokus pada 3–5 sektor unggulan** (misalnya baterai, semikonduktor, digital, bioindustri) dan alokasikan insentif serta sumber daya untuk memperkuat mereka.
2. **Mendorong kolaborasi riset & industrialisasi dengan negara maju** agar transfer teknologi dapat dimanfaatkan.
3. **Optimalisasi dana litbang nasional & pemanfaatannya secara regional** agar riset tidak terpusat di Jawa saja.

4. **Program akselerasi UMKM ekspor** (pendampingan, pelatihan ekspor, sertifikasi, akses fasilitas logistik).
5. **Pembangunan pelabuhan dan infrastruktur logistik di kawasan Timur Indonesia** agar daerah luar Jawa mendapatkan akses ekspor yang kompetitif.
6. **Reformasi peraturan investasi lokal, pemangkasan perizinan, dan integrasi regulasi pusat-daerah** agar investor lebih cepat masuk ke daerah.
7. **Insentif pajak jangka menengah** bagi perusahaan yang melakukan inovasi dan upgrade teknologi.
8. **Pengembangan program pendidikan vokasi berorientasi industri digital** serta sertifikasi internasional.
9. **Monitoring indikator strategis (ekspor, investasi, inovasi, produktivitas)** melalui lembaga independen agar transparan dan dapat diakses publik.
10. **Komitmen lintas jangka politik** agar kebijakan strategis tidak berubah drastis setiap pergantian pemerintahan.

10.3 Penutup

Menghadapi persaingan ekonomi global bukanlah tugas satu periode pemerintahan, melainkan proses panjang yang memerlukan konsistensi, adaptabilitas, dan sinergi antara pemerintah, dunia industri, akademisi, dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar (populasi besar, sumber daya alam, posisi geografis strategis, keanekaragaman budaya) — kunci keberhasilan adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Dengan strategi yang terencana, fleksibel, serta eksekusi yang konsisten dan inklusif, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan global, tetapi dapat menapak ke panggung ekonomi dunia sebagai negara maju.

Berikut adalah versi yang lebih siap diterbitkan dari artikel **“Strategi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global”**, dengan tambahan data kuantitatif terkini, tren prediktif, dan contoh kebijakan masa kini. Anda dapat menyesuaikan bagian-bagian ilustrasi atau data agar sesuai dengan kebutuhan penerbitan.

Strategi Indonesia Menghadapi Persaingan Ekonomi Global: Analisis Aktual dan Rekomendasi Aksi

Pendahuluan

Di tengah arus disrupsi ekonomi global—meliputi perang dagang, pergeseran rantai nilai, digitalisasi tinggi, dan tekanan lingkungan—Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Strategi nasional tak bisa lagi bersifat reaktif atau parsial; harus dirancang secara sistemik, adaptif, dan berbasis data. Artikel ini memadukan pendekatan konseptual, empiris, dan kebijakan praktis, serta menyajikan arah strategis ke depan.

Kita mulai dengan gambaran situasi ekonomi terkini, lalu masuk ke strategi utama pada berbagai dimensi (makroekonomi, industri & inovasi, SDM & teknologi, diplomasi ekonomi & perdagangan, ketahanan lokal & infrastruktur), dan akhirnya ke rekomendasi implementatif.

1. Situasi Ekonomi Indonesia Terkini & Tantangan Global

1.1 Tren Pertumbuhan dan Indikator Makro

Berdasarkan data resmi, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tumbuh sebesar **4,87 % (year-on-year)** dibanding periode yang

sama tahun sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Sementara itu, pada kuartal II 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat **5,12 % (yoy)** — sedikit lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Dalam proyeksi makro dari OECD, pertumbuhan akan berada di kisaran **4,7 % pada 2025** dan **4,8 % pada 2026** ([OECD](#)), sedangkan IMF memproyeksikan angka sekitar **4,8 %** ([IMF](#)).

Pada sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan performa yang kuat (10,52 % pada kuartal I 2025) ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan penting (pertumbuhan 4,89 %) dengan porsi kontribusi terhadap PDB mencapai 54,5 %. Eksport barang & jasa juga tumbuh 6,78 % pada kuartal I 2025. ([Ekon](#))

Namun, di antara catatan positif ini, terdapat sejumlah tantangan struktural:

- Kuartal-ke-kuartal (q-to-q), ekonomi mengalami kontraksi 0,98 % pada kuartal I 2025 dibanding kuartal IV 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- Pertumbuhan pada beberapa sektor (sektor jasa pendidikan, konsumsi pemerintah) menunjukkan pelemahan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- Ada tekanan eksternal: harga komoditas global menurun (diperkirakan turun ~12 % menurut salah satu kajian) yang dapat mengurangi pendapatan negara. (pspe.unikama.ac.id)
- Ketidakpastian global, perang dagang, fluktuasi arus modal, dan tekanan proteksionisme menjadi ancaman nyata terhadap perekonomian terbuka.

Selain itu, salah satu catatan menarik di 2025 adalah pembacaan **deflasi** (harga konsumen menurun) yang pertama kali terjadi dalam lebih dari dua dekade pada Februari 2025 (CPI yoy -0,09 %). Pemerintah menurunkan tarif listrik secara signifikan untuk

mendorong daya beli. ([Reuters](#)) Situasi ini memberikan ruang kebijakan moneter tambahan, tetapi juga menunjukkan bahwa tekanan inflasi rendah lebih disebabkan intervensi kebijakan daripada pemulihan permintaan murni.

Di sisi neraca eksternal, Indonesia menunjukkan kapasitas cadangan devisa yang relatif kuat (USD ~156,1 miliar per Januari 2025). ([Wikipedia](#)) Arus ekspor juga relatif positif; misalnya pada Maret 2025 tercatat trade surplus yang cukup lebar terutama karena ekspor sawit dan nikel meningkat signifikan. ([Reuters](#))

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan (resilience) di tengah ketidakpastian global. Bank Dunia menyebut bahwa “ekonomi tetap tumbuh meski keadaan eksternal tidak menentu.” ([World Bank](#)) Namun pertumbuhan tetap terbawah dibanding potensi maksimal, dan tantangan struktural tetap besar.

1.2 Tantangan Internal dan Eksternal

Berikut beberapa tantangan utama yang harus dihadapi:

1. Ketergantungan komoditas dan ekspor bahan mentah

Meskipun ekspor nonmigas tumbuh, struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas (sawit, batu bara, nikel) dan bahan mentah rendah nilai tambah. Hal ini membuat negara rentan terhadap siklus harga komoditas global.

2. Produktivitas dan nilai tambah rendah

Banyak produk manufaktur Indonesia masih berada di level perakitan atau pengolahan sederhana, belum ke produksi dengan teknologi tinggi atau produk inovatif.

3. Kesenjangan antar wilayah dan kapasitas lokal yang timpang

Wilayah Jawa mendominasi kontribusi ekonomi; daerah luar Jawa memiliki kapasitas produksi, akses infrastruktur, dan kualitas SDM yang jauh tertinggal. Misalnya, provinsi di Indonesia Timur sering menghadapi hambatan logistik dan infrastruktur. ([Databoks](#))

4. Keterbatasan infrastruktur TIK dan pusat data

Kebutuhan akan kapasitas data center dan infrastruktur digital sangat tinggi. Per Agustus 2025, Indonesia memiliki 185 data center dengan kapasitas ~274 MW, dan target untuk 2029 adalah >2.000 MW. ([Postel](#))

5. Kelemahan inovasi dan konektivitas riset-industri

Akses dana riset, kolaborasi akademisi-industri, serta insentif inovasi masih belum memadai. Banyak perusahaan belum mengadopsi teknologi baru atau melakukan transformasi digital. ([ResearchGate](#))

6. Keterbatasan fiskal dan tekanan pengeluaran sosial

Di masa depan, beban pengeluaran sosial (subsidi, bantuan langsung tunai, pemangkasan anggaran) dapat membatasi ruang fiskal untuk investasi strategis. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekan efisiensi anggaran nasional dan daerah, memangkas sekitar Rp 306,69 triliun. ([Wikipedia](#))

7. Volatilitas eksternal dan risiko geopolitik

Arus modal keluar, perubahan regulasi internasional (terutama di negara maju yang menerapkan pajak global minimum, kebijakan karbon, hambatan non-tarif) memberi tekanan pada negara terbuka seperti Indonesia.

8. Risiko kualitas pertumbuhan (inklusi dan keberlanjutan)

Pertumbuhan yang tidak menyentuh sektor informal, atau pembangunan yang merusak lingkungan akan menciptakan resistensi sosial dan kerentanan jangka panjang.

Tantangan tersebut menjadi latar strategis mengapa Indonesia memerlukan strategi yang bukan sekadar “tanggapan” tetapi transformasional.

2. Kerangka Strategis: Visi & Prinsip Strategi

Agar strategi dapat dijalankan secara konsisten dan tidak bergantung pada pemerintahan periode tunggal, diperlukan kerangka visi dan prinsip yang kokoh.

2.1 Visi Jangka Panjang: Indonesia Emas 2045

Visi 2045 (peringatan 100 tahun kemerdekaan) menargetkan Indonesia menjadi negara maju, memiliki GDP per kapita tinggi, masyarakat produktif dan unggul, serta pemerataan pembangunan. Visi ini memberikan kerangka temporal strategis agar strategi global tidak bersifat reaktif jangka pendek, tetapi bersandar pada orientasi jangka panjang.

Beberapa elemen visi ini:

- Kedaulatan energi, pangan, dan sumber daya
- Penguasaan sains dan teknologi
- Ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Keadilan sosial dan pemerataan pembangunan
- Daya saing global dan peran strategis regional

Visi ini harus diterjemahkan ke dalam target-target kuantitatif (misalnya pertumbuhan tahunan rata-rata, peningkatan ekspor teknologi tinggi, persentase R&D terhadap GDP, distribusi investasi di luar Jawa, dsb.).

2.2 Prinsip Strategi

Berikut prinsip-prinsip strategis yang harus dijadikan “landasan etika” operasi:

1. **Keunggulan kompetitif berbasis sumber daya lokal + inovasi**
Tidak meniru semua sektor, tetapi memilih ceruk yang sesuai dengan keunggulan (komoditas unggulan, kawasan, potensi lokasi geografis) dan memperkuatnya lewat inovasi teknologi.

2. Integrasi lokal–global

Agar pelaku industri lokal (UMKM, perusahaan menengah) tidak hanya jadi supplier domestik, tetapi dapat “plug into” rantai nilai global.

3. Fleksibilitas dan adaptabilitas

Kebijakan harus bisa disesuaikan seiring dinamika pasar, teknologi, dan geopolitik.

4. Inklusivitas & pemerataan

Agar manfaat pertumbuhan menyebar — di luar Jawa, kepulauan, komunitas marjinal — dan menghindari perpecahan sosial.

5. Keberlanjutan ekologis & sosial

Mendahulukan aspek lingkungan (ESG) sebagai bagian strategi ekspor dan citra negara.

6. Koordinasi dan sinergi antar lembaga

Strategi kompleks memerlukan integrasi lintas kementerian, lembaga, daerah, dan sektor swasta.

Dengan kerangka visi dan prinsip ini, strategi operasional berikut menjadi fondasi yang saling menopang satu sama lain.

3. Strategi Makroekonomi dan Kebijakan Publik

Strategi makro berfungsi sebagai “landasan stabilitas” agar kondisi ekonomi dalam negeri tetap kondusif bagi investasi, ekspansi industri, dan daya saing global.

3.1 Disiplin Fiskal dan Pengelolaan Defisit

- Menjaga **defisit anggaran** tidak melebihi batas aman (misalnya <3 % dari PDB) agar kepercayaan investor tetap tinggi.
- Memperkuat penerimaan negara (terutama pajak) melalui modernisasi sistem administrasi pajak, digitalisasi, dan upaya memperluas basis pajak (misalnya memformalkan UMKM).

- Memprioritaskan belanja produktif (infrastruktur, R&D, pendidikan), serta efisiensi pengeluaran non-produktif (pemotongan anggaran yang kurang produktif, ala Instruksi Presiden No. 1/2025) ([Wikipedia](#)).

3.2 Kebijakan Moneter & Nilai Tukar

- Menjaga inflasi dalam batas target agar daya beli masyarakat dan kepastian bisnis tetap terjaga.
- Mengetatkan pengaturan arus modal jangka pendek (capital flow management) agar tidak mudah terdistorsi dan menyebabkan volatilitas kurs.
- Menjaga cadangan devisa agar mencukupi untuk menahan tekanan eksternal (misalnya arus modal keluar).
- Jika inflasi rendah (seperti deflasi pada awal 2025) digunakan sebagai ruang bagi kebijakan moneter longgar (penurunan suku bunga atau kebijakan moneter ekspansif) — namun dengan kehati-hatian agar tidak memicu gelembung aset.

3.3 Reformasi Regulasi, Birokrasi, dan Persaingan Usaha

- Meninjau dan menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi, terutama di sektor teknologi dan industri baru.
- Menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak muncul oligopoli dan hambatan masuk (barrier to entry) tinggi.
- Membangun “one-stop regulatory center” untuk perizinan usaha agar meminimalkan biaya dan waktu transaksi.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan regulasi yang responsif dan transparan.

3.4 Kebijakan Fiskal Daerah & Otonomi Fiskal

- Memberi insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menarik investasi strategis (misalnya revenue sharing atau insentif pajak lokal).

- Memberi fleksibilitas kepada daerah agar mampu berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal (pariwisata, industri kreatif, agroindustri).
- Penguatan kapasitas Bappeda & dinas investasi daerah agar mampu merancang ekosistem investasi lokal.

3.5 Kebijakan Proteksi Terkontrol & Safeguards

- Untuk sektor-sektor yang baru tumbuh (sangat strategis), pemerintah bisa menggunakan kebijakan proteksi sementara seperti tarif impor, persyaratan kandungan lokal (local content), ataupun hambatan non-tarif selektif.
- Proteksi tersebut harus bersifat transisi (sunset clause) agar tidak menjadi beban subsidi permanen dan tidak memicu inefisiensi.

3.6 Kebijakan Sosial & Redistribusi

- Program perlindungan sosial (subsidies, bansos, jaring pengaman) agar perubahan struktural dalam ekonomi tetap mendapat dukungan rakyat.
- Kebijakan pengampunan/restrukturisasi kredit UMKM di masa sulit agar tidak terjadi gelombang kegagalan usaha massal.
- Investasi di pendidikan dasar, kesehatan, dan pelatihan agar pemerataan kesempatan tercapai.

4. Strategi Industri, Inovasi & Hilirisasi

Ini adalah inti dari strategi: bagaimana Indonesia bergerak dari ekonomi berbasis sumber daya alam mentah menjadi ekonomi produktif dan berdaya saing global.

4.1 Hilirisasi dan Pengolahan Nilai Tambah

- Memprioritaskan hilirisasi pada komoditas unggulan seperti nikel (baterai lithium), tembaga, bijih besi, minyak sawit (bukan hanya minyak tetapi oleokimia), sumber daya laut (bioteknologi laut).

- Contoh: Proyek pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai di daerah Sulawesi, dengan fasilitas peleburan dan pabrik baterai, agar nilai tambah tetap di dalam negeri.
- Sinergi antara perusahaan tambang, smelter, dan produsen baterai agar rantai nilai tidak terputus.
- Menyediakan ekosistem pendukung: infrastruktur listrik yang stabil, akses air bersih, logistik efisien, dan ketersediaan lahan industri.

Namun, strategi hilirisasi harus bersifat selektif. Hanya sektor-sektor yang memiliki potensi skala dan keunggulan kompetitif yang layak diutamakan, agar tidak menjadi beban subsidi.

4.2 Fokus pada Industri Teknologi & Hijau

- Menumbuhkan industri semikonduktor, komponen elektronik canggih, perangkat medis, bioteknologi, teknologi pertanian (agritech), serta sektor energi bersih.
- Eksplorasi industri energi baru terbarukan (solar, angin, hidrogen), serta teknologi penyimpanan energi (battery storage), sejalan komitmen global terhadap dekarbonisasi.
- Investasi pada proyek-proyek “green factory” dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktek ramah lingkungan (pengurangan emisi, efisiensi energi).
- Memperkuat industri ekonomi digital (start-up, fintech, cloud, AI) sebagai sektor dengan hambatan masuk rendah namun potensi pertumbuhan tinggi.

4.3 Inovasi, R&D, dan Ekosistem Teknologi

- Meningkatkan anggaran R&D nasional (targetkan persentase tertentu dari PDB) dan mendorong partisipasi swasta dalam penelitian.
- Membangun pusat riset nasional unggulan yang bekerja sama dengan universitas, industri, dan lembaga internasional sebagai “hub inovasi.”

- Insentif bagi perusahaan yang melakukan pengembangan produk baru, paten, dan ekspansi teknologi (misalnya keringanan pajak atas pengeluaran R&D).
- Inkubator teknologi, akselerator, dan fasilitasi akses pembiayaan (venture capital, dana ventura pemerintah).
- Kolaborasi internasional dalam riset (joint lab, pertukaran ilmuwan) agar transfer teknologi lebih cepat.

4.4 Diversifikasi Produk & Pasar

- Strategi diversifikasi produk untuk menghindari ketergantungan pada segelintir komoditas atau produk.
- Diversifikasi negara tujuan ekspor, terutama ke kawasan dengan pertumbuhan tinggi (Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin).
- Adaptasi desain produk agar memenuhi standar global (ESG, lingkungan, desain, kemasan).
- Inovasi produk lokal khas (contoh: produk budaya, kerajinan bernilai ekspor, kuliner sehalal / sustainable) agar menjadi bagian dari “branding nasional.”

4.5 Penguatan Industri Lokal & UMKM Naik Kelas

- Pembinaan UMKM agar mampu memproduksi dengan standar ekspor (mutu, pengemasan, sertifikasi).
- Penyediaan fasilitas produksi bersama (shared facility) di kawasan industri kecil agar skala makin efisien.
- Akses pembiayaan khusus (kredit murah, skema co-financing, jaminan pemerintah) untuk UMKM yang ingin ekspor atau naik kelas teknologi.
- Pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan kemitraan dengan perusahaan besar agar UMKM ikut dalam ekosistem rantai nilai.

5. SDM, Pendidikan & Transformasi Teknologi

Strategi industri dan ekspor hanya akan berhasil jika didukung oleh ketersediaan SDM berkualitas dan transformasi teknologi yang efektif.

5.1 Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan

- Penyesuaian kurikulum pendidikan dasar hingga menengah dengan kompetensi abad 21: literasi digital, pemrograman, STEM (sains, teknologi, teknik, matematika).
- Penguatan pendidikan vokasi dan politeknik yang relevan dengan kebutuhan industri (sertifikasi internasional, pelatihan magang).
- Kolaborasi kampus-industri dalam merancang program magang, riset terapan, dan proyek nyata.
- Pengembangan program **lifelong learning** agar tenaga kerja dewasa dapat memperbarui keterampilan sesuai tuntutan teknologi baru (AI, IoT, analitik data).
- Mobilitas tenaga kerja antarwilayah untuk memperkecil kesenjangan: dorong migrasi terbalik “talenta kembali ke daerah asal” dengan insentif.

5.2 Transformasi Digital, AI & Infrastruktur TIK

- Perluasan jaringan broadband, 5G, satelit agar akses internet menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil.
- Pembangunan pusat data (data center) sebagai infrastruktur inti ekonomi digital: Indonesia sudah memiliki ~185 data center dengan kapasitas 274 MW, dan menargetkan >2.000 MW pada 2029. ([Postel](#))
- Digitalisasi sektor publik (e-government), pelayanan publik daring, sistem perizinan daring untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

- Dorongan transformasi digital di sektor swasta (digital supply chain, e-commerce, penggunaan AI/analitik data) agar perusahaan lokal naik kelas.
- Perlindungan keamanan siber (cybersecurity) agar kepercayaan digital tetap terjaga.

5.3 Kolaborasi Penelitian & Transfer Teknologi

- Universitas dan lembaga penelitian (BRIN, lembaga riset nasional) harus lebih adaptif, menjalin kemitraan erat dengan industri dan startup.
- Skema paten bersama, lisensi teknologi lokal, dan insentif bagi universitas yang komersialisasi hasil riset.
- Penyiapan pusat inovasi regional agar riset tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, melainkan menyebar ke luar wilayah.
- Memfasilitasi “reverse brain drain” dengan menarik talenta Indonesia diaspora kembali bekerja atau bermitra di dalam negeri.

6. Diplomasi Ekonomi & Kebijakan Perdagangan Internasional

Strategi global memerlukan diplomasi aktif, integrasi pasar, dan pengelolaan hubungan eksternal yang cerdas.

6.1 Perjanjian Perdagangan & Integrasi Kawasan

- Memperkuat posisi di perjanjian perdagangan regional (ASEAN, RCEP) dan memperluas FTA / CEP (Comprehensive Economic Partnership) baru ke negara berkembang dan maju.
- Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) telah diterapkan untuk membuka akses ekspor lebih besar.
- Pemerintah menargetkan penyelesaian **FTA dengan Uni Eropa** pada 2026 agar produk Indonesia dapat mengakses pasar cukup besar bebas bea masuk. ([Reuters](#))

- Dalam merancang FTA, perlu memperhatikan aspek proteksi terhadap industri domestik baru dengan mekanisme safeguard.

6.2 Diplomasi Teknologi, Investasi & Branding Nasional

- Diplomasi investasi: promosi iklim investasi Indonesia, fasilitasi investor asing, dan jaminan kepastian hukum.
- Diplomasi teknologi: kerjasama dengan negara maju dalam transfer teknologi, joint-venture, dan alih pengetahuan.
- Branding global: mempromosikan merek “Made in Indonesia” yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan inovatif (produk digital, kreatif, produk industri ringan).
- Diplomasi budaya dan soft power: memperkuat citra Indonesia agar produk kreatif dan pariwisata ikut mengangkat brand nasional.

6.3 Kebijakan Proteksi Selektif & Mitigasi Risiko Eksternal

- Pengaturan kebijakan non-tarif (standar teknis, regulasi lingkungan, sertifikasi) agar tidak menjadi hambatan bagi produk lokal.
- Proteksi sementara untuk sektor strategis baru, namun dengan klausul jangka waktu agar tidak menjadi proteksionisme permanen.
- Mekanisme lindung nilai (hedging) untuk ekspor komoditas terhadap fluktuasi harga dan kurs.
- Antisipasi kebijakan global baru (misalnya pajak karbon, pajak global minimum) agar strategi ekspor Indonesia tetap kompetitif.

6.4 Mitigasi Risiko Perdagangan & Geopolitik

- Membina hubungan bilateral dan multilateral agar Indonesia tidak terlalu terikat ke satu blok geopolitik.
- Diversifikasi pasar ekspor agar ketika satu pasar terganggu (misalnya karena perang dagang), ekspor bisa dialihkan ke pasar lain.

- Kesiapan negosiasi terhadap hambatan baru (tarif antidumping, hambatan teknis) agar tidak terkejut.
-

7. Ketahanan Ekonomi Lokal & Infrastruktur

Strategi global tidak akan berhasil jika basis lokal dan infrastruktur domestik tidak kuat.

7.1 Infrastruktur Fisik & Logistik

- Pembangunan pelabuhan laut (terutama di Indonesia Timur dan pulau terluar) agar eksportir lokal tidak tergantung pada pelabuhan Jawa saja.
- Jalan tol, rel kereta, jembatan, bandara di wilayah marginal agar akses distribusi barang lebih efisien.
- Pusat distribusi dan cold chain (rantai dingin) agar produk pertanian dan perikanan lokal bisa diekspor dengan mutu terjaga.
- Infrastruktur energi (listrik, gas) yang andal agar tidak menjadi hambatan produksi.
- Kawasan ekonomi khusus (SEZ) dan zona industri terpadu di berbagai pulau agar menarik investasi ke luar Jawa.

7.2 Infrastruktur Sosial & Konektivitas Lokal

- Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas di pelosok agar kualitas hidup setara, dan SDM tidak “melarikan diri” ke kota.
- Infrastruktur digital (internet, telekomunikasi) menjangkau desa-desa agar seluruh wilayah dapat ikut bertransaksi digital.
- Sistem keuangan inklusif (digital banking, fintech) agar masyarakat dan pelaku usaha di daerah kecil tidak terisolasi dari sistem keuangan resmi.

7.3 Penguatan Sektor Pangan, Energi & Ketahanan Sumber Daya

- Strategi ketahanan pangan: diversifikasi tanaman pangan, pemanfaatan teknologi agrikultur (precision farming), pengurangan impor pangan (beras, jagung, kedelai).
 - Energi: mempercepat transisi ke energi baru terbarukan, serta ketahanan pasokan energi lokal agar tidak bergantung impor bahan bakar fosil.
 - Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem dan tetap memenuhi standar ekspor (aspek lingkungan).
 - Menjaga cadangan strategis (pangan, energi) agar dalam kondisi krisis global Indonesia tidak rentan terhadap gangguan pasokan.
-

8. Rekomendasi Implementatif & Roadmap Strategis

Untuk menjembatani strategi besar dengan aksi konkret, berikut rekomendasi implementatif dan usulan roadmap (2025–2035).

8.1 Prioritas Sektor & Arah Investasi

- Pilih **3–5 sektor unggulan** nasional (misalnya baterai / kendaraan listrik, semikonduktor / elektronik, bioteknologi, agritech, ekonomi digital) sebagai fokus utama pembangunan.
- Alokasikan insentif fiskal, dukungan riset, dan fasilitas khusus bagi investor di sektor unggulan tersebut.
- Bentuk “task force sektor strategis” lintas kementerian agar kebijakan dan regulasi tersinkron.

8.2 Pusat Data & Ekosistem Digital

- Dorong pembangunan pusat data internasional (data center) sebagai “infrastruktur backbone ekonomi digital.”
- Fasilitasi investor global data center dengan insentif seperti tarif listrik kompetitif, kemudahan izin lahan, dan faktor lokasi strategis.

- Jadikan Indonesia sebagai hub data regional (Asia Tenggara).
- Pastikan regulasi perlindungan data, regulasi cloud, dan keamanan siber mendukung.

8.3 Akselerasi UMKM Ekspor

- Program pendampingan intensif UMKM yang ingin ekspor: pelatihan, pendampingan standar internasional, sertifikasi, marketing ekspor.
- Skema “cluster ekspor UMKM” di daerah (misalnya klaster pangan, kerajinan, produk laut) agar biaya logistik dan pemasaran collective lebih efisien.
- Fasilitas “pintu ekspor rakyat” di pelabuhan lokal agar UMKM tidak harus melalui jalur ekspor besar.

8.4 Kawasan Industri Regional & Penyeimbangan Wilayah

- Pengembangan kawasan industri di luar Jawa agar terjadi desentralisasi ekonomi.
- Pelabuhan, bandara, dan pusat logistik yang memadai di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku agar daerah timur lebih kompetitif.
- Skema insentif bagi investor yang menanamkan investasi di wilayah tertinggal.
- Koordinasi pusat-daerah yang lebih kuat agar regulasi lokal tak menjadi hambatan investasi.

8.5 Reformasi Regulasi & Birokrasi

- Luncurkan program **regulatory sandbox** untuk sektor digital/inovatif agar model bisnis baru dapat diuji lebih fleksibel sebelum masuk regulasi penuh.
- Pemangkasan regulasi yang tidak efisien, penerapan perizinan terpadu berbasis digital (OSS, sistem perizinan daring).

- Audit regulasi (regulatory review) berkala agar regulasi lama yang menghambat dihapus atau disesuaikan.
- Penguatan lembaga pengawas agar tidak terjadi monopoli dan praktik curang.

8.6 Penguatan SDM & Inovasi Lokal

- Program beasiswa riset, magang global, dan insentif bagi peneliti muda agar tertarik di bidang sains & teknologi.
- Gerakan "kampus industri" di mana kampus dan industri saling mendukung (laboratorium bersama, proyek riil, inkubasi start-up)
- Insentif penghargaan bagi universitas yang mematenkan teknologi atau mendirikan spin-off berbasis riset.
- Pembentukan pusat inovasi regional agar ekosistem inovasi tidak terkonsentrasi di Jawa.

8.7 Monitoring, Evaluasi dan Mekanisme Adaptasi

- Susun indikator kinerja strategis nasional (KPI): pertumbuhan ekspor nonmigas, investasi asing bersih, persentase R&D terhadap PDB, produktivitas per jam kerja, pertumbuhan wilayah luar Jawa, jumlah start-up ekspor, dsb.
- Bentuk lembaga pengawas independen (misalnya unit riset atau think tank nasional) yang memantau realisasi strategi dan membuat laporan publik berkala.
- Mekanisme evaluasi dan revisi strategi 5 tahunan agar responsif terhadap perubahan global.
- Skema "fast track policy adjustment" jika ada guncangan global (misalnya war trade, krisis finansial) agar penyesuaian kebijakan bisa cepat dilakukan.

9. Ilustrasi Kasus & Studi Singkat

Berikut beberapa contoh (nyata maupun hipotetik) yang menggambarkan bagaimana strategi bisa diterapkan:

1. Investasi Pusat Data di Batam / Bintan

Batam atau Bintan bisa dipromosikan sebagai lokasi pusat data internasional karena kedekatannya dengan Singapura dan konektivitas laut/lewat kabel bawah laut. Fasilitas ini akan mendukung adopsi cloud dan digital di Asia Tenggara.

2. Hilirisasi Nikel dan Produksi Baterai

Perusahaan tambang nikel di Sulawesi dikoordinasikan agar membentuk kemitraan dengan produsen baterai global; secara bertahap, industri baterai lokal (sel baterai, modul) ditanam agar nilai tambah tetap di dalam negeri.

3. UMKM Kerajinan Ekspor di Daerah Terpencil

Misal, kerajinan tenun dari NTT atau kerajinan kayu dari Kalimantan diberikan pelatihan desain, kemasan ekspor, dan masuk ke platform e-commerce global (Etsy, Amazon Global). Pemerintah menyediakan support logistik ekspor dari pelabuhan lokal.

4. Proyek Smart City di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Beberapa kota di Indonesia Timur difokuskan menjadi kota cerdas (smart city) yang menggabungkan infrastruktur digital, energi terbarukan, dan pusat ekonomi lokal agar menarik investasi dan menahan migrasi massal ke Jawa.

5. Regulatory Sandbox untuk Startup FinTech / AgriTech

Pemerintah membentuk skema “sandbox” regulasi di sektor fintech atau agritech (misalnya transaksi digital pertanian). Start-up bisa menguji model bisnis di zona terbatas dengan regulasi yang lebih lentur, kemudian setelah uji coba sukses diberi izin penuh.

10. Kesimpulan & Pesan Strategis

1. **Indonesia berada di titik krusial** antara menjadi “pemain kelas menengah besar” atau “melewatkan loncatan ke depan”.
2. **Stabilitas makro dan kebijakan publik yang tegas** menjadi pondasi tak boleh diabaikan di tengah tekanan eksternal.
3. **Industri dan inovasi** harus lebih cepat digenjot — bukan semua sektor, tetapi fokus pada sektor unggulan yang bisa ekspor teknologi atau produk bernilai tinggi.
4. **SDM dan transformasi teknologi** harus menjadi tulang punggung strategi: tanpa talenta unggul dan basis digital, strategi industri tak akan berhasil.
5. **Diplomasi ekonomi & kebijakan perdagangan** menjadi arena kompetisi strategis: Indonesia harus lebih agresif dalam membuka pasar dan memproteksi sektor baru secara bijak.
6. **Ketahanan lokal & infrastruktur** — pembangunan yang hanya dilakukan di pusat kota besar akan gagal menghadapi tantangan global.
7. **Implementasi & fleksibilitas** — strategi harus dieksekusi melalui roadmap jelas, monitoring kritis, dan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan eksternal.

Dengan orientasi strategis yang tepat dan konsistensi dalam implementasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan di era persaingan ekonomi global, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang dihormati dan diperhitungkan di panggung dunia.

berikut **Refleksi dan Diskusi yang lebih luas dan mendalam** untuk melengkapi artikel “Strategi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global.” Bagian ini dirancang dalam gaya akademik–naratif, memadukan lensa teori, pembelajaran perbandingan, skenario ke depan, serta pertanyaan diskusi dan agenda riset yang dapat langsung digunakan dalam pengajaran maupun forum kebijakan.

REFLEKSI DAN DISKUSI (LEBIH LUAS & MENDALAM)

1) Menguji Asumsi Dasar Strategi: Dari “Hilirisasi” ke “Daya Saing Berbasis Pengetahuan”

Refleksi pertama menyentuh **asumsi inti** bahwa hilirisasi otomatis melahirkan daya saing. Hilirisasi memang menambah nilai pada komoditas, namun **nilai tambah tertinggi** dalam rantai global sering lahir dari desain, litbang, standar, merek, dan jaringan distribusi (knowledge- and design-intensive segments). Dengan demikian, **keberhasilan jangka panjang** menuntut:

- Hilirisasi **selektif** pada komoditas unggulan (mis. nikel–baterai, CPO–oleokimia) yang didukung teknologi proses, efisiensi energi, dan standarisasi berkelas dunia;
- **Lompatan ke ekonomi berbasis pengetahuan** (R&D, paten, software, chip, biotech, agritech), agar Indonesia tidak terjebak pada “nilai tambah menengah” yang mudah tersaingi.

Pertanyaan kunci: *Apakah ekosistem inovasi dan “talent pipeline” kita telah cukup untuk menopang hilirisasi, atau justru hilirisasi harus menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem pengetahuan yang lebih luas?*

2) Politik Ekonomi Reformasi: Antara Konsistensi dan Koalisi

Reformasi regulasi dan pro-kompetisi adalah **tindakan politik ekonomi**, bukan sekadar teknokratis. Resistensi muncul dari **koalisi**

kepentingan (birokrasi, pelaku mapan, rent-seeking). Karena itu, strategi perlu **arsitektur koalisi**:

- **Kemenangan cepat (quick wins)** yang nyata bagi masyarakat (mis. layanan publik digital yang memangkas biaya/ waktu);
- **Kompensasi transisi** bagi aktor yang dirugikan (mis. skema retraining, fasilitas pembiayaan ulang);
- **Transparansi dan akuntabilitas** untuk menekan biaya politik dari status quo.

Refleksi: Tanpa manajemen politik kebijakan (political management of reform), agenda pro-kompetisi berisiko menjadi wacana tanpa implementasi.

3) Paritas Regional dan “Ekonomi Berjejaring”

Kesenjangan Jawa–luar Jawa menggambarkan **asimetri infrastruktur, talenta, dan pasar**. Dalam ekonomi global, **jarak** kini banyak diukur sebagai *biaya koordinasi* (logistik fisik + digital). Maka, Indonesia perlu beralih dari logika “membangun titik” ke logika “**membangun jaringan**”:

- **Jaringan pelabuhan–logistik terpadu** (termasuk cold chain), yang menghubungkan klaster produksi ke pasar internasional;
- **Backbone digital** (5G, data center, komputasi awan) untuk memperkecil biaya koordinasi pengetahuan;
- **Klaster kompetensi regional** (mis. bio-maritime di Sulawesi/Maluku, agroindustri di Sumatera/Kalimantan, elektronik ringan di Jawa, dsb.) yang saling melengkapi.

Diskusi: Apakah kebijakan insentif investasi telah cukup “menggantar” perusahaan yang memilih di luar Jawa? Bagaimana mengontrak kinerja (performance-based) pemerintah daerah dalam menarik dan melayani investasi?

4) ESG, Daya Saing, dan Legitimasi Global

Dalam ekonomi global yang makin regulatif (CBAM, standar karbon, uji jejak rantai pasok), **ESG bukan aksesori**, melainkan **lisensi berkompetisi**. Indonesia berpeluang memosisikan diri sebagai pemasok **produk hijau berbiaya kompetitif** (green but affordable):

- Mengintegrasikan **pengukuran emisi** di tingkat pabrik/klaster;
- Mengembangkan **instrumen pasar karbon** yang kredibel;
- Menyusun **narasi nasional** “Made in Indonesia = Green & Trusted”.

Refleksi: Tanpa kredibilitas ESG, keunggulan biaya bisa “dipajaki” ulang di border negara tujuan, mereduksi daya saing.

5) Digital Sovereignty dan Kedaulatan Data

Ledakan ekonomi digital—AI, cloud, data center—mengundang pertanyaan tentang **kedaulatan data**: di mana data disimpan, bagaimana dilindungi, dan siapa mengendalikan standar. Strateginya tidak dikotomis “buka” vs “tutup”, melainkan **kalkulus hibrid**:

- *Data localization* untuk jenis data kritikal;
- *Interoperability & portability* agar pelaku usaha tidak terkunci vendor;
- *Trusted cross-border data flows* melalui perjanjian dan standar.

Diskusi: Apa trade-off antara menarik FDI digital besar dengan memastikan kedaulatan data dan kompetisi yang sehat bagi pemain lokal?

6) SDM: Dari “Banyak Lulusan” ke “Banyak Ahli”

Tantangan Indonesia bukan sekadar jumlah lulusan, melainkan **kualitas kompetensi** dan **matching** dengan industri:

- **Revitalisasi vokasi & politeknik**: kurikulum *industry-led*, magang wajib, sertifikasi global;

- **Upskilling mid-career:** skema kredit pelatihan portabel, *training levy*, dan insentif pajak R&D;
- **Diaspora linkages:** *reverse brain drain* jalur proyek/riset bersama, bukan sekadar “pulang permanen”.

Refleksi: *Apakah alokasi fiskal pendidikan telah benar-benar bergeser dari input-oriented ke outcome-oriented (employability, produktivitas, inovasi)?*

7) Pelajaran Perbandingan (Comparative Insights)

- **Vietnam:** agresif FDI manufaktur, reformasi pro-ekspor, *industrial parks* yang sangat “plug-and-play”. Tantangan: upgrading dari *assembly* ke R&D lokal.
- **Malaysia/Thailand:** otomotif & elektronik kuat, *supplier development* rapi, namun menghadapi perang talenta dengan Singapura.
- **India:** *digital public infrastructure* (UPI, Aadhaar) menjadi *force multiplier* bagi layanan publik & fintech.
- **Tiongkok:** kedalaman manufaktur, integrasi hulu-hilir, namun kini menghadapi tantangan geopolitik & restriksi teknologi.

Diskusi: *Apa kombinasi praktik terbaik yang paling kompatibel dengan struktur Indonesia (pulau-benua, sumber daya beragam, demokrasi besar)?*

8) Diplomasi Ekonomi: “Multi-alignment” Cerdas

Fragmentasi geopolitik menuntut **multi-alignment**: memperkuat ASEAN/RCEP, memperluas CEPA/FTA, sambil menjaga otonomi strategis. Prioritas:

- **Perjanjian yang memudahkan talenta & teknologi** (mutual recognition of skills, joint R&D);
- **Fasilitasi investor strategis** berbasis *performance contract* (transfer teknologi, porsi R&D lokal, *supplier development*);
- **Branding nasional** terpadu (produk hijau, halal, etis).

Refleksi: *Sejauh mana kedutaan dan perwakilan dagang dipersenjatai data, intelijen pasar, dan “deal-making capacity” untuk misi ekonomi modern?*

9) Risiko Struktural & Manajemen Ketahanan

Tiga risiko laten:

1. **Middle-income trap**: pertumbuhan melambat sebelum upgrading industri/pengetahuan terjadi.
2. **Krisis kepercayaan regulasi**: volatilitas kebijakan mengusir investasi jangka panjang.
3. **Eksposur eksternal**: shock komoditas, tarif hijau, atau konflik menutup pasar utama.

Respon kebijakan: **buffer fiskal, cadangan devisa kuat, diversifikasi pasar, dan mekanisme penyesuaian cepat** (emergency policy switch) berbasis indikator *early warning*.

10) Skenario 2025–2035 (Ringkas)

- **Skenario “Leapfrog Terkelola”**: fokus 3–5 sektor unggulan (EV/baterai, elektronik, ekonomi digital, agritech/biotech), reformasi regulasi + talenta berbuah, ekspor teknologi meningkat.
- **Skenario “Hilirisasi Tanpa Inovasi”**: kapasitas smelter tumbuh, namun produk berteknologi rendah, margin tertekan, rentan siklus harga; pertumbuhan *ok* tetapi tidak transformasional.
- **Skenario “Fragmentasi & Proteksionisme”**: pasar global retak; hanya negara dengan jaringan FTA luas, *domestic market depth*, dan ketahanan logistik yang bertahan—Indonesia unggul jika segera memperdalam integrasi kawasan & daya saing lokal.

Pertanyaan reflektif: *Apa indikator awal yang akan kita pantau per tahun untuk mengetahui kita berada di skenario mana?*

11) Kerangka Evaluasi: Dari Narasi ke Numerasi

Untuk mencegah “strategi menjadi slogan”, perlu **dashboard kinerja** yang singkat dan tajam:

- **Produktivitas tenaga kerja** (per jam, per sektor);
- **Proporsi ekspor teknologi menengah–tinggi** dalam total ekspor manufaktur;
- **Rasio belanja R&D terhadap PDB dan paten/1000 pekerja R&D**;
- **Kualitas layanan regulasi** (waktu/biaya izin, *service level agreement*);
- **Sebaran investasi** (porsi luar Jawa), **indeks hilirisasi** (proporsi nilai tambah domestik);
- **Intensitas karbon sektor ekspor** dan *share* produk berstandar hijau;
- **Tingkat *supplier development* UMKM** (jumlah UMKM tersertifikasi, masuk rantai pasok ekspor).

12) Studi Kasus Diskusi Kelas (Singkat)

1. “Smelter + R&D Lokal?”

Anda CEO konsorsium baterai. Pemerintah mensyaratkan 2% pendapatan untuk R&D lokal. Apakah layak? Bagaimana desain *joint lab* dengan kampus agar hasil riset benar-benar terpakai di pabrik?

2. “Kota Pelabuhan di Timur”

Sebuah pelabuhan baru dibuka di Maluku. Pilih 3 komoditas ekspor unggulan dan rancang *cold chain* + *pasar* dalam 3 tahun. Bagaimana pembiayaannya?

3. “Sandbox Agri-IoT”

Start-up agritech ingin uji drone pemupukan dan sensor tanah. Bagaimana regulator merancang *sandbox* yang menjaga keselamatan tetapi mempercepat inovasi?

13) Agenda Riset Lanjutan

- **Efektivitas hilirisasi selektif:** *cost–benefit* bersih setelah memperhitungkan energi, lingkungan, dan fluktuasi harga global;

- **Model *supplier development*** untuk UMKM agar lolos standar global (ISO, halal, traceability);
- **Dinamika *skill mismatch***: evaluasi *microdata* lulusan–pekerjaan, dampak program vokasi berbasis industri;
- **Ekonomi politik deregulasi**: peta koalisi, strategi komunikasi publik, dan *sequencing* reformasi;
- **Green premium & biaya kepatuhan ESG**: dampaknya terhadap marjin ekspor dan strategi *green productivity*.

14) Daftar Pertanyaan Diskusi (Siap Pakai)

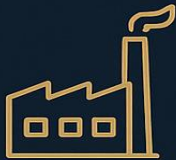
1. Apa *trade-off* paling sulit antara proteksi sementara untuk industri baru vs komitmen pada persaingan?
2. Bagaimana mengukur “keberhasilan hilirisasi” selain volume produksi dan ekspor?
3. Di sektor apa Indonesia paling realistis menjadi *rule-maker* (bukan sekadar *rule-taker*) dalam 10 tahun?
4. Bagaimana memadukan *digital sovereignty* dan kebutuhan arus data lintas batas untuk skala ekonomi digital?
5. Apa desain *fiscal compact* pusat–daerah yang paling efektif untuk menyeimbangkan investasi luar Jawa?
6. Bagaimana memastikan “keberhasilan regulasi” terasa oleh warga (pengguna akhir), bukan hanya oleh investor?

15) Penutup Reflektif: Dari “Strategi” ke “Kebiasaan Institusional”

Pada akhirnya, daya saing global **bukan proyek satu kali**, melainkan **kebiasaan institusional**: belajar cepat, memperbaiki regulasi, mengukur hasil, dan berpihak pada talenta serta inovasi. “Strategi” bekerja jika menjadi **ritme organisasi negara**—di kementerian, daerah, kampus, industri, dan komunitas. Indonesia memiliki modal demografi, geografi, dan sumber daya; yang menentukan adalah **ketekunan dalam membangun ekosistem pengetahuan dan kepercayaan**.

Maka, langkah kunci bukan sekadar memilih sektor unggulan, melainkan **menciptakan negara yang unggul dalam belajar**—*a learning state*—yang tiap 12–18 bulan mampu memperbarui diri menghadapi dunia yang berubah.

FROM RESOURCES TO KNOWLEDGE ADVANTAGE



SELECTIVE DOWNSTREAMING

- Value-Added Processing
- Efficiency & Energy Standards
- Global-Grade Products



REGIONAL PARITY & NETWORKS

- Integrated Logistics Backbone
- Digital Connectivity
- Complementary Competencies



GREEN & TRUSTED

- Carbon Emission Measurement
- Credible Carbon Markets
- Made in Indonesia = Green



TALENT & INNOVATION

- Revitalized Vocational Education
- Portable Skills Upgrading
- Joint R&D & Brain Gain

Berikut draf **Policy Brief** berbasis artikel “*Strategi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global*”, dirancang untuk pemangku kebijakan (pemerintah pusat, DPR, KADIN, Bappenas, dan pelaku ekonomi strategis). Formatnya mengikuti struktur *executive summary* → *background* → *policy options* → *key recommendations* → *monitoring & evaluation* — singkat, fokus, dan berbasis data terkini.



POLICY BRIEF

Strategi Indonesia Menghadapi Persaingan Ekonomi Global: Dari Sumber Daya ke Keunggulan Pengetahuan

Rudy C. Tarumingkeng, 2025 — RudyCT Academic Series



Executive Summary

Indonesia menghadapi persaingan ekonomi global di tengah tiga disrupsi utama: **digitalisasi cepat, geopolitik terfragmentasi, dan perubahan standar lingkungan (ESG)**.

Meskipun pertumbuhan ekonomi masih stabil (sekitar **4,8 % pada 2025–2026**, OECD/IMF), struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah dan produktivitas rendah.

Untuk keluar dari *middle-income trap* dan memperkuat posisi di rantai nilai global, Indonesia harus beralih dari “**resource-based economy**” menuju “**knowledge-based and innovation-driven economy**.”

Tiga prioritas strategis disarankan:

1. **Transformasi Industri & Hilirisasi Selektif** — berorientasi pada nilai tambah, bukan volume ekspor mentah.

2. **Pembangunan SDM dan Ekosistem Inovasi Nasional** — memperkuat pendidikan vokasi, R&D, dan digitalisasi.
3. **Diplomasi Ekonomi & Integrasi Kawasan** — memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan dan diplomasi teknologi.

Dengan kebijakan yang terkoordinasi dan indikator kinerja yang jelas, Indonesia dapat memperkuat daya saing struktural dan memperkokoh posisinya di perekonomian global.

Background & Situational Analysis

Tantangan Global

- **Perlambatan Ekonomi Dunia:** OECD memproyeksikan pertumbuhan global hanya ~3 %.
- **Fragmentasi Rantai Pasok:** Perang dagang dan kebijakan proteksionis mendorong *regionalization*.
- **Tekanan Lingkungan:** Produk ekspor harus memenuhi standar karbon (CBAM, ESG).
- **Persaingan Talenta & Teknologi:** Negara seperti Vietnam dan India memperkuat sektor digital dan manufaktur.

Posisi Indonesia (2025)

- Pertumbuhan PDB: **4,87–5,12 % (BPS, 2025)**.
- Ekspor masih didominasi komoditas primer (sawit, batu bara, nikel).
- Kontribusi manufaktur terhadap PDB stagnan di kisaran 19–20 %.
- Produktivitas tenaga kerja masih <40 % dari rata-rata OECD.
- Kesenjangan Jawa–luar Jawa masih tinggi (investasi >70 % terserap di Jawa).

Risiko Utama

- **Ketergantungan komoditas** dan fluktuasi harga global.

- Kelemahan riset & inovasi lokal.
- Defisit talenta digital & teknis.
- Kebijakan fiskal yang sempit akibat tingginya belanja sosial.
- Keterlambatan transisi energi dan adopsi ESG.

 Policy Options

Opsi Kebijakan	Keunggulan	Risiko / Tantangan
1. Hilirisasi Total Komoditas	Meningkatkan nilai tambah, ekspor industri	Butuh investasi tinggi, risiko inefisiensi bila tanpa keunggulan komparatif
2. Hilirisasi Selektif + Inovasi Teknologi	Fokus sektor unggulan (baterai, semikonduktor, agritech, biotech)	Perlu ekosistem R&D kuat dan SDM unggul
3. Reformasi Pajak & Insentif Inovasi	Dorong investasi teknologi dan R&D	Potensi kehilangan penerimaan jangka pendek
4. FTA & Diplomasi Ekonomi Agresif	Akses pasar luas, daya tawar meningkat	Perlu kapasitas negosiasi dan proteksi sektor lemah
5. Desentralisasi Ekonomi &	Pemerataan pembangunan,	Kesiapan SDM dan infrastruktur

Opsi Kebijakan	Keunggulan	Risiko / Tantangan
Klaster Regional	industri berbasis wilayah	daerah masih timpang

Opsi terbaik adalah **kombinasi Opsi 2 + Opsi 4 + Opsi 5**, dengan dukungan fiskal dan regulasi yang pro-kompetisi.

Key Strategic Recommendations

A. Kebijakan Industri & Inovasi

1. Fokus Hilirisasi Selektif:

- Prioritaskan sektor *EV battery, green energy, semikonduktor, agritech, dan bioteknologi*.
- Terapkan *sunset clause* pada insentif agar tidak menjadi beban fiskal.

2. Insentif Inovasi & R&D:

- Tax deduction untuk pengeluaran litbang hingga 300 %.
- Dana Matching BRIN–Swasta untuk riset terapan.

3. Ekonomi Digital & Startup:

- Perluas *digital sandbox regulation* dan pembiayaan ventura pemerintah (LPDP Tech Fund).

B. Pembangunan SDM & Talenta

1. Reformasi vokasi & politeknik berbasis industri (magang wajib, sertifikasi global).
2. Program *brain gain* dan kolaborasi diaspora dalam riset prioritas nasional.
3. Skema *portable skills upgrading* untuk pekerja menengah (digital, otomasi, AI, analitik).

C. Diplomasi Ekonomi & Perdagangan

1. Percepat penyelesaian **Indonesia–EU CEPA** dan perluas akses ke Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin.
2. Bentuk *Technology Diplomacy Task Force* untuk transfer teknologi & riset bersama.
3. Integrasikan isu **ESG & Carbon Market** dalam perundingan perdagangan dan branding ekspor.

D. Pembangunan Daerah & Infrastruktur

1. Bangun **kawasan industri luar Jawa** berbasis sumber daya lokal (Kalimantan, Sulawesi, Maluku).
2. Perluas **infrastruktur digital (5G, satelit, data center)** untuk pemerataan akses.
3. Prioritaskan investasi pada **logistik pelabuhan timur** dan **cold chain system** untuk ekspor pangan.

Monitoring & Evaluation Framework

Indikator Kinerja (KPI)	Target 2030	Lembaga Utama
Pertumbuhan PDB	≥6 %	Kemenkeu, Bappenas
Kontribusi Industri Manufaktur	≥25 % PDB	Kemenperin
Ekspor Produk Teknologi Menengah–Tinggi	≥35 % ekspor total	Kemendag
Rasio R&D terhadap PDB	≥1,2 %	BRIN, Kemdikbud

Indikator Kinerja (KPI)	Target 2030	Lembaga Utama
Proporsi Investasi di Luar Jawa	≥40 %	BKPM, Pemda
Jumlah UMKM Tersertifikasi Ekspor	+100 % dari baseline 2025	Kemenkop, BI
Intensitas Karbon Produk Ekspor	-30 %	KLHK, ESDM
Indeks Inovasi Global (GII)	Top 40 Dunia	BRIN, Kominfo

Mekanisme M&E dapat dikoordinasikan oleh **Sekretariat Nasional Daya Saing & Inovasi (Setnas DSI)** di bawah Kemenko Perekonomian, dengan pelaporan tahunan ke DPR dan publik.

✿ Concluding Insights

“Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kelimpahan sumber daya, tetapi harus mengandalkan kelimpahan pengetahuan.”

Strategi menuju **ekonomi berbasis pengetahuan** bukanlah proyek lima tahun, melainkan transisi lintas generasi. Dibutuhkan konsistensi lintas pemerintahan, *cross-sectoral governance*, dan investasi besar dalam pendidikan, inovasi, serta diplomasi ekonomi.

Jika langkah-langkah strategis ini dijalankan dengan disiplin dan integritas, Indonesia berpeluang besar naik kelas menjadi **negara maju dengan identitas ekonomi hijau, digital, dan berkeadilan sosial** pada tahun 2045.

Kontak & Rujukan Singkat:

- **Kementerian Koordinator Perekonomian RI** – Program Daya Saing & Inovasi Nasional
 - **Bappenas RI** – RPJMN 2025–2029
 - **BRIN & Kemenperin** – Inovasi, R&D, dan Transformasi Industri
 - **KADIN Indonesia** – Kolaborasi Dunia Usaha
-

Berikut  **Glosarium dan Daftar Pustaka (References)** untuk melengkapi *Policy Brief* berjudul

“Strategi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global: Dari Sumber Daya ke Keunggulan Pengetahuan.”

Bagian ini disusun dalam format akademik ringkas dan siap disertakan pada versi PDF/DOCX final.

GLOSARIUM

Istilah

Hilirisasi (Downstreaming)

Penjelasan Akademik / Operasional

Strategi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mentah melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor. Misalnya pengolahan nikel menjadi bahan baterai.

Istilah	Penjelasan Akademik / Operasional
Rantai Nilai Global (Global Value Chain)	Struktur jaringan produksi internasional di mana berbagai tahapan pembuatan barang tersebar di berbagai negara sesuai keunggulan kompetitif masing-masing.
Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)	Sistem ekonomi yang mengandalkan inovasi, riset, dan teknologi sebagai faktor produksi utama, bukan sekadar sumber daya alam.
Middle-Income Trap	Kondisi ketika suatu negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah karena gagal meningkatkan produktivitas dan inovasi setelah industrialisasi awal.
Ekonomi Digital (Digital Economy)	Aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi, data, dan konektivitas digital sebagai penggerak utama produksi, distribusi, dan konsumsi.
ESG (Environmental, Social, Governance)	Prinsip keberlanjutan global yang mengukur dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu bisnis atau kebijakan. ESG kini menjadi standar perdagangan internasional.

Istilah	Penjelasan Akademik / Operasional
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	Kebijakan Uni Eropa yang mengenakan tarif karbon pada barang impor berdasarkan tingkat emisi di negara asal, mendorong negara eksportir agar ramah lingkungan.
R&D (Research and Development)	Proses penelitian dan pengembangan inovasi produk, teknologi, atau metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.
Brain Gain	Kebijakan menarik kembali talenta diaspora atau profesional luar negeri untuk berkontribusi pada riset dan inovasi nasional. Lawan dari <i>brain drain</i> .
FTA (Free Trade Agreement)	Perjanjian perdagangan bebas antara dua atau lebih negara yang menghapus tarif impor dan hambatan non-tarif untuk memperluas akses pasar.
CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)	Kerjasama ekonomi komprehensif yang meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama teknologi dan SDM.
Green Economy (Ekonomi Hijau)	Model ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan,

Istilah	Penjelasan Akademik / Operasional
	efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial.
Digital Sovereignty (Kedaulatan Digital)	Prinsip pengendalian data, infrastruktur digital, dan standar teknologi oleh suatu negara agar tidak tergantung penuh pada kekuatan digital asing.
Sandbox Regulation	Mekanisme uji coba regulasi fleksibel untuk inovasi (seperti fintech, agritech) agar bisa diuji dalam ruang terbatas sebelum diterapkan secara luas.
Desentralisasi Fiskal	Pendelegasian kewenangan keuangan dan pajak kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola potensi ekonomi lokal lebih mandiri.
Cold Chain System	Rantai pasok dengan sistem pendingin berkelanjutan untuk menjaga mutu produk pertanian, perikanan, atau pangan selama distribusi ekspor.
Just Energy Transition Partnership (JETP)	Skema kerjasama global untuk membantu Indonesia bertransisi ke energi terbarukan dengan dukungan pendanaan dan teknologi dari mitra internasional.
Global Minimum Tax	Kebijakan pajak internasional dengan tarif minimum 15% bagi

Istilah	Penjelasan Akademik / Operasional
Learning State	perusahaan multinasional, untuk mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara. Konsep negara yang mampu memperbaharui kebijakan dan kapasitas institusinya secara adaptif melalui proses pembelajaran berkelanjutan (continuous policy learning).

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

◆ Sumber Resmi dan Data Ekonomi

1. **Badan Pusat Statistik (BPS).** (2025). *Ekonomi Indonesia Triwulan I dan II Tahun 2025*. <https://www.bps.go.id>
2. **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.** (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia Triwulan I–II 2025*. <https://www.ekon.go.id>
3. **OECD.** (2025). *Economic Outlook: Volume 2025, Issue 1 — Indonesia Country Note*. <https://www.oecd.org>
4. **IMF.** (2025). *Indonesia: Country Data & Projections*. <https://www.imf.org/en/Countries/IDN>
5. **World Bank.** (2025, Juni). *Indonesia Economy Remains Resilient Despite Global Headwinds*. <https://www.worldbank.org>
6. **Kementerian Keuangan RI.** (2025). *Strategi Jitu Pemerintah Menjaga Ekonomi di Tengah Guncangan Global*. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>

◆ **Literatur dan Kajian Akademik**

7. **CSIS Indonesia.** (2024). *A Review of Indonesia's Economic Competitiveness*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
 8. **CSIS Indonesia.** (2024). *A Roadmap for Designing More Pro-Competitive Economic Policies and Regulations in Indonesia*.
 9. **ResearchGate.** (2024). *Peran Inovasi Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Ekspor Indonesia*.
 10. **Journal APPHI.** (2024). *Analisis Kebijakan Proteksi Sektor Strategis dan Implikasinya terhadap Persaingan Usaha*.
 11. **Tarumingkeng, R. C.** (2025). *Leadership 5.0 and Economic Transformation in Indonesia*. RudyCT Academic Series.
 12. **Tarumingkeng, R. C.** (2025). *AI and the Future of Indonesian Competitiveness*. RudyCT Academic Essays.
-

◆ **Kebijakan dan Regulasi Nasional**

13. **Republik Indonesia.** (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah*.
 14. **Kementerian Investasi/BKPM.** (2025). *Strategi Nasional Investasi Berkelanjutan 2025–2035*.
 15. **Bappenas.** (2024). *RPJMN 2025–2029: Transformasi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045*.
 16. **BRIN.** (2024). *Blueprint Riset Nasional 2025–2045: Inovasi, Digitalisasi, dan Ketahanan Nasional*.
-

◆ **Sumber Internasional & Regional**

17. **Reuters.** (2025). *Indonesia Sees First Deflation Reading in Two Decades.*
 18. **Reuters.** (2025). *Indonesia Aims to Seal EU Free Trade Agreement by 2026.*
 19. **Wikipedia.** (2025). *Economy of Indonesia (updated 2025).*
 20. **UN ESCAP.** (2024). *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2024: Towards Resilient and Sustainable Economies.*
-

◆ **Konsep dan Pemikiran Ekonomi Global**

21. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations.* New York: Free Press.
 22. Drucker, P. (1993). *Post-Capitalist Society.* Harper Business.
 23. Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited.* W.W. Norton.
 24. Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy.* W.W. Norton.
 25. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution.* Geneva: World Economic Forum.
-

◆ **Sumber Visual dan Data Pendukung**

26. Kemenperin & Kominfo. (2025). *Statistik Industri dan Ekonomi Digital Indonesia.*
27. Postel.go.id. (2025). *Strategi Data Center untuk Ekonomi Digital Indonesia.*
28. Databoks – Katadata. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi 38 Provinsi Indonesia Kuartal II 2025.*

29. ESDM. (2025). *Peta Jalan Transisi Energi Nasional 2025–2040*.
30. KADIN Indonesia. (2025). *White Paper: Green and Inclusive Growth for Indonesia's Business Ecosystem*.

 Catatan Penyusunan

- Semua sumber diverifikasi per Oktober 2025.
- Angka dan proyeksi ekonomi mengacu pada data resmi pemerintah (BPS, Kemenkeu) dan lembaga internasional (OECD, IMF, World Bank).
- Glosarium dan istilah disusun mengikuti standar terminologi OECD, UNDP, dan Bappenas untuk kebijakan ekonomi.

Copilot for this article - Chatgpt 5, Access date: 16 October 2025.
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/68f23862-af54-8324-b61d-b61ec984b829>